

ABSTRAK

REKONSTRUKSI SISTEM SANKSI DALAM KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERORIENTASI PADA KEADILAN EKOLOGIS

Untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam idealnya dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologis sehingga kegiatan pertambangan dapat menyejahterakan masyarakat. Namun, adanya persoalan dalam pengelolaan izin tambang yang timbul akibat pengaturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pertambangan) membuat penyelenggaraan pertambangan saat ini masih menimbulkan berbagai masalah. Tujuan utama disertasi ini adalah mengkaji, menyusun, serta merekonstruksi sistem sanksi dalam kebijakan perizinan pertambangan mineral yang ideal untuk menjamin keadilan ekologis di masyarakat. Disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode *economic analysis of law*. Hasil penelitian ini pada intinya menunjukkan adanya beberapa persoalan dalam tata kelola pertambangan mineral Indonesia. Persoalan tersebut tampak dari adanya kelemahan dalam pengaturan Pasal 162 dan Pasal 165 UU Pertambangan. Selain itu, kurangnya penegakan hukum akibat lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat juga membuat kepatuhan masyarakat, khususnya pemegang izin pertambangan terhadap peraturan perundang-undangan masih lemah. Berbagai masalah tersebut pada intinya menunjukkan bahwa Pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang selaras dengan nilai keadilan ekologis. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengambil prakarsa untuk merevisi UU Pertambangan serta mengembangkan dan memperkuat digitalisasi sistem pengawasan perizinan pertambangan mineral. Lebih dari itu, Kepolisian, khususnya Bareskrim dan institusi Penegak Hukum lain perlu lebih mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari aparaturnya.

Kata kunci: sistem sanksi, perizinan, pertambangan, keadilan ekologis.

ABSTRACT

RECONSTRUCTION OF CRIMINAL SANCTIONS IN MINERAL AND COAL MINING LICENSING POLICIES ORIENTED TOWARDS

In order to maintain a balance between the obligation to preserve the environment and fulfilment of the need for natural resources, pengelolaan sumber daya alam idealnya dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologis. However, the issues arising from the management of mining permits due to the regulations and implementation of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, as amended several times, most recently with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Mineral and Coal Mining Law/*UU Minerba*), continue to cause problems in the current mining operations. This has prompted the preparation of this article to examine, compile, and reconstruct the ideal criminal sanctions within the policy of mineral and coal mining (*Minerba*) permits. In formulating its arguments, this article utilizes the normative legal research method supported by the economic analysis of law (EAL) method. The results of this study essentially indicate various issues in the governance of Indonesia's mineral and coal mining sector. From a regulatory perspective, the current provisions of Article 162 and Article 165 of the Mining Law still have weaknesses. Furthermore, the lack of law enforcement due to weak supervision and public participation also contributes to the weak compliance of the community, especially mining permit holders, with the legislation. Berbagai masalah tersebut pada intinya menunjukkan bahwa Pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang selaras dengan nilai keadilan ekologis. These various issues ultimately demonstrate the need for the government to implement policies that align with the principles of ecological justice in the mining sector. Therefore, the government needs to take the initiative to revise the Mining Law and develop and strengthen the digitization of the mineral and coal mining permit monitoring system. Moreover, the police, especially the Bareskrim (Criminal Investigation Agency) and other law enforcement institutions, need to intensify their supervision over the execution of the duties of their apparatus.

Keywords: sanction system, licensing, mining, ecological justice